

Analisis Kesiapan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pengembangan *E-Government* di Kabupaten Banyumas

Titis Perdani¹¹

Abstraksi

In 2012, the government of Banyumas Regency authorized Local Regulation No. 4 of 2012 on the Master Plan for Development of E-government in Banyumas Regency. Banyumas Regency becomes the only regency in Central Java which has regulation regarding E-government and received many awards in the field of IT. For that reason, this research aims to see what and how the action plan will be implemented over the next 5 years and how the readiness of the government of Banyumas Regency. The method used in this paper is descriptive qualitative method. The data source obtained from the primary data, which is through interviews with informants or key person by snowball sampling technique. Meanwhile, secondary data derived from the data of documents, archives, and other sources related to the research. Analysis techniques used in this research is qualitative data analysis in the form of description, illustration, and drawing conclusions on the tendency researched.

Keywords: Readiness, Regency Government, Implementation of Local Regulation, E-Government.

A. Latar Belakang

Dalam dua dekade terakhir ini praktisi dunia telah memasuki era jaringan komputerisasi informasi global. Revolusi digitalisasi telah sedemikian massif terjadi dengan ditandai semakin meluasnya pemakaian handphone yang menembus batasan kelas social, salah satunya penggunaan jaringan internet telah masuk ke dalam ruang pribadi dengan akses yang semakin mudah dan cepat (Nico Adrianto, 2007;1). Hal ini dapat dilihat juga dari teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication/ICT*) yang saat ini tidak terbatas pada bidang perdagangan saja, melainkan juga dalam bidang-bidang lainnya, seperti pendidikan, pertahanan dan keamanan negara, sosial dan sebagainya. ICT ini dipergunakan karena memiliki berbagai kelebihan dibandingkan dengan menggunakan cara tradisional dalam melakukan interaksi dalam hal kecepatan, kemudahan dan biaya yang lebih murah.

Formasi perkembangan revolusioner era digital seharusnya dimanfaatkan secara strategis untuk memperoleh keuntungan darinya. Kekuatan era digital membawa kemungkinan

¹ Mahasiwi Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP Angkatan 2011

baru untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan kata lain, mempertemukan potensi hebat reformasi birokrasi dan revolusi digitalisasi, utamanya pemanfaatan dunia cyber dalam sector pemerintahan untuk hal-hal positif. Birokrasi kita selama ini di desain untuk bekerja lambat, berhati-hati dan metodologis sudah tidak bisa lagi diterima masyarakat yang memerlukan pelayanan cepat, efisien , tepat waktu dan simple.

Kabupaten Banyumas adalah salah satu yang mencoba melaksanakan reformasi birokrasinya dengan menerapkan pemanfaatan *e-government* di lingkungan pemerintahannya. Pada tahun 2012 pemerintah setempat mengesahkan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan *E-Governmnet*. Dalam implementasinya Perda tersebut diperlukan banyak aspek maupun daya dukung baik itu dari sisi kebijakan , kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), maupun anggaran. Sehingga perlu adanya kajian terhadap daya dukung tersebut di lokus kebijakan akan diterapkan yaitu di wilayah pemerintahan Kabupaten Banyumas sendiri. Serta kemudian mengetahui bagaimana hasil dari kajian terhadap formulasi dari pelaksanaan Perda Nomer 4 Tahun 2012 yang dijadikan rekomendasi dalam pelaksanaan kedepannya demi mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien dengan mengadopsi konsep *e-government*.

B. Tujuan dan Manfaat

Untuk mengetahui seperti apa formulasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pelaksanaan *E-Governmnet* di Kabupaten Banyumas serta kondisi daya dukung dilihat dari berbagai aspek di Kabupaten Banyumas sebagai persyaratan terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pelaksanaan *E-Governmnet* di Kabupaten Banyumas. Sedangkan manfaaat dari penelitian ini sendiri : manfaat praktis, penelitian ini diharapkan akan memeperoleh pemahaman yang jelas berkenaan pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pelaksanaan *E-Governmnet* di Kabupaten Banyumas Serta dapat digunakan untuk masukan atau rekomendasi maupun evaluasi pertimbangan dalam wacana pelaksanaan program kebijakan tersebut di Kabupaten Banyumas.Sedangkan manfaat teoritis berarti untuk memeperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kebijakan *e-government*. Serta sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang menyangkut masalah peneyelenggaraan program *e-government*.

C. Kerangka Pemikiran Teoritis

1. Implementasi Kebijakan

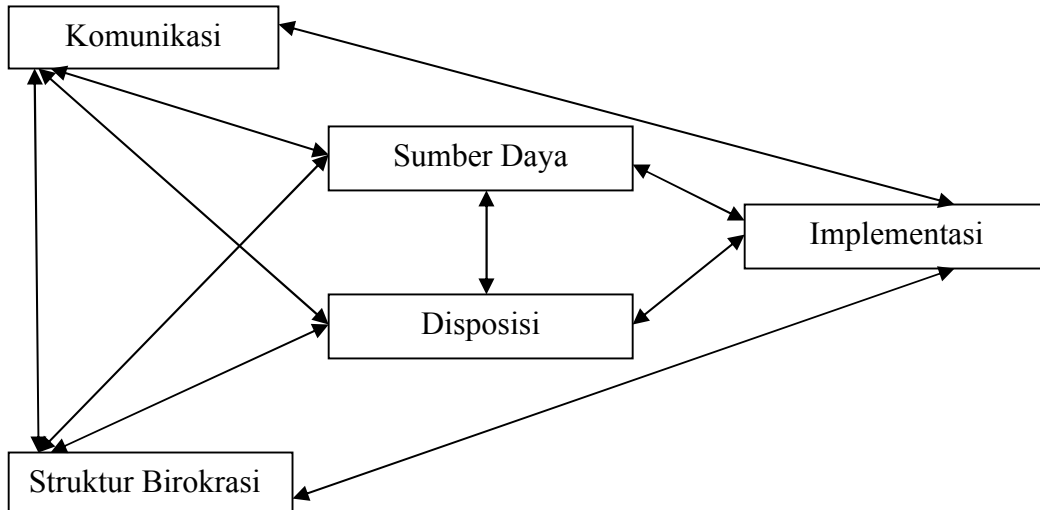
Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (Lester dan Stewart,104) dalam Winarno Budi, (2007:144). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai actor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan (Randall B. Ripley dan Grace A.Franklin,1982:4 dalam Winarno Budi, 2007:145)

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward menunjukkan 4 faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi:

1. Komunikasi, yaitu menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group).
2. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya financial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan.
3. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.
4. Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya telah ditetapkan melalui Standar Operating Procedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program atau kebijakan.

Keempatnya memiliki keterkaitan satu sama lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Model George C Edward III ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Model Implementasi Edward III



Sumber : Edward III, 1980:48

2. Pengertian E-Government

E-government dapat didefinisikan sebagai seluruh tindakan dalam sektor publik (baik pusat maupun daerah) yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mengoptimalkan proses pelayanan publik yang efisien, transparan, dan efektif (Prasojo, *et.al.*, 2007:82). Menurut Indrajit yang dikutip dalam Rianto Budi dan Lestari Tri (2012:36) : “Bahwa *e-government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan”.

Menurut Inpres Nomer 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan, bahwa penerapan *e-government* dapat dilaksanakan melalui tingkatan sebagai berikut :

1. **Tingkat persiapan** yang meliputi :
 - a. Pembuatan situs informasi di setiap lembaga;
 - b. Penyiapan SDM;
 - c. Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana Multipurpose Community Center, Wernet, dll;
 - d. Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.
2. **Tingkat pematangan** yang meliputi :
 - a. Pembuatan situs informasi publik interaktif;
 - b. Pembuatan antar muka keterhubungan antar lembaga lain.
3. **Tingkat pematapan** yang meliputi :
 - a. Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;
 - b. Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
4. **Tingkat pemanfaatan** yang meliputi :
 - a. Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G (Government To Government), G2B (Government To Business) dan G2C (Government To Citizen) yang terintegrasi.

Strategi pengembangan *E-Government* disusun dengan pendekatan perencanaan strategis yang bersifat luwes dan dinamis. Dengan pendekatan perencanaan strategis maka partisipasi *stakeholders* (masyarakat dunia usaha dan perguruan tinggi) diperlukan untuk meningkatkan rencana pengembangan ini. Untuk strategi pengembangan *E-Government* dapat dilakukan dengan cara:

1. Pembangunan infrastruktur dan akses jaringan komunikasi data yang memadai,
2. Pengembangan SDM untuk mengelola *E-Government*,
3. Pengembangan perangkat-perangkat lunak yang diperlukan,
4. Pengembangan basis data (*databases*) dan basis pengetahuan (*knowledge bases*) pendukung *E-Government*,
5. Pengembangan organisasi dan tata kerja yang mendukung *E-Government*,
6. Pembuatan aturan perundangan dan kebijakan yang diperlakukan untuk mendukung *E-Government* di daerah masing-masing.
7. Pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak dan keras/jaringan,

8. Pengembangan dan koordinasi layanan informasi yang mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang kompetitif serta menarik investasi ke daerah.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Rencana Tindak Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pelaksanaan *E-Government* di Kabupaten Banyumas

Setelah pemetaan atau pendataan terhadap aplikasi apa saja yang dibutuhkan dan diintegrasikan di setiap SKPD maka langkah selanjutnya berkaitan dengan strategi pengembangan *e-government* Kabupaten Banyumas yang dijabarkan ke dalam program lima tahun sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi pembuatan situs informasi di setiap SKPD, penyiapan SDM dan penyiapan sarana akses.

Ada 3 (tiga) aktifitas yang dilakukan pada tahap ini, antara lain :

- a. Pembuatan situs informasi di SKPD yang menjadi sub domain www.banyumaskab.go.id, standarisasi dan penataan email serta operasional situs SKPD;
- b. Penataan SDM yang kompeten dalam bidang *e-government* telah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. SDM yang ada tetap perlu mendapatkan pencerahan pengetahuan bidang TIK, mengingat perkembangan teknologi tersebut yang sedemikian cepat serta sertifikasi pengelola *e-government*;
- c. Pengembangan NOC, data center dan jaringan data antar SKPD yang meliputi penataan gedung, penyediaan pentanahan listrik dan data, penyediaan catu daya cadangan, penyediaan peralatan pendukung, pengembangan server (web, email, aplikasi, data base, VPN dan proxy), pengembangan sistem *security* dan penyediaan sistem *backup data*.

2. Tahap Pematangan

Tahap pematangan meliputi pembuatan situs informasi publik interaktif, penyusunan standar operasional prosedur dan pembuatan interoperabilitas jaringan antar unit kerja.

Ada 4 (empat) aktifitas yang dilakukan dalam tahapan ini, antara lain :

- a. Pembuatan situs informasi publik yang interaktif integrasi SMS gateway dan situs SKPD serta pengembangan forum tanya jawab SKPD;
- b. Peningkatan kesadaran sumber daya aparatur pemerintah dalam menangani data dan informasi. Aktivitas ini diharapkan akan dapat mengubah budaya kerja yang menyesuaikan dengan perkembangan TIK;
- c. Penyesuaian TIK yang sedang dipakai dengan teknologi yang lebih sesuai. Salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah dengan penerapan sistem pengamanan jaringan dan informasi.
- d. Penyesuaian tata laksana organisasi (standar operating procedure) dengan perkembangan TIK yang digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan baik internal maupun untuk pelayanan.

3. Tahap Pematapan

Tahap pematangan meliputi pembuatan situs portal transaksi pelayanan publik dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data antar lembaga.

Ada 2 (dua) aktifitas yang dilakukan dalam tahapan ini, antara lain :

- a. Menyusun data base terpadu beserta situs pendukung yang menampung kepentingan internal maupun untuk kepentingan pelayanan untuk menjamin keterhubungan dengan lembaga lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu sensus yang menyeluruh terhadap semua aktivitas sistem informasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga dapat disusun data base terpadu yang tepat. Prioritas penyusunan data base terpadu pada aplikasi kependudukan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, administrasi dan manajemen, kesehatan serta investasi;
- b. Pembuatan situs portal transaksi pelayanan publik.

4. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan meliputi pembuatan aplikasi pelayanan antar pemerintah, antara pemerintah dengan kelompok bisnis, antara pemerintah dengan akademisi, dan antara pemerintah dengan masyarakat.

Bahwasanya hampir 80 % kegiatan yang ditargetkan di dua tahun pelaksanaan yaitu tahun 2013 dan 2014 sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana, adapun untuk perencanaan yang ditargetkan akan berjalan tiap tahunnya sudah barang tentu tidak bisa maksimal di satu atau dua tahun berjalan karena sifatnya yang terus berkembang dan mengalami pembaharuan.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan E-Government di Kabupaten Banyumas

Dengan adanya Perda Nomer 4 Tahun 2012 sendiri berarti sudah terhitung 2 (dua) tahun Perda ini berjalan. Sudah ada beberapa penerapan program dan kegiatan yang dijalankan oleh Kabupaten Banyumas antara lain Website portal dan sub domain, E-Office, penerapan Sistem Absensi Elektronik Pegawai (SIMAP) , Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan Online (SIAP Online) , Sistem Informasi Masyarakat Perdesaan (SIMDES), Sistem Informasi Daerah (SIMDA), Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah *Kabupaten Banyumas* (SIMBADAMAS), Sistem Informasi dan Manajemen Puskesmas (SIMPUS), Sistem Informasi Perancangan Pembangunan Daerah (SIPPD), Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) . Selain itu kegiatan yang sedang berjalan saat ini yaitu Proses Bisnis yang dilaksanakan di RSUD Banyumas.

Konsep *e-government* memang suatu konsep yang luas jika dijabarkan lebih lanjut, karena penggunaan prinsip teknologi yang bersifat dinamis dan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis berusaha menilai kesiapan dengan melihat kedalam beberapa pelaksanaan antara lain mengamati beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan secara umum di lingkup Pemerintahan Kabupaten Banyumas yaitu Website, E-Office, dan Absensi Elektronik sehingga nantinya dapat mengambil kesimpulan secara umum berdasarkan pengamatan pelaksanaan atas ketiganya.

3. Analisis Kondisi Daya Dukung Terlaksananya Kebijakan

Terkait dengan daya dukung sendiri berdasarkan hasil analisis menggunakan teori George C Edward III yaitu factor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi yang selama ini ada dan telah dijalankan di Kabupaten Banyumas. Maka dapat disimpulkan dari keempatnya hanya komunikasi dan Sumber Dayalah yang cenderung cukup mendukung pelaksanaan Perda ini tetapi juga tidak secara sempurna. Faktor komunikasi misalnya terdiri dari transmisi, konsistensi, dan kejelasan informasi. Dalam ranah transmisi dan kejelasan di tataran dinas teknis pelaksana (Kominfo) sudah cukup baik menjalankan tugas sebagai komunikator kebijakan melalui berbagai sosialisasi,

pelatihan dan pendampingan namun disisi pegawai SKPD cenderung belum memahami betul isi dari Perda tersebut sehingga tingkat konsistensinya pun dirasa kurang.

Dari sisi sumber daya infrastuktur sudah memadai tetapi memang disisi anggaran dan sumber daya manusia masih sangat kurang. Faktor inilah yang menjadi momok mengapa pelaksanaan rencana tindak tadi menggunakan skala prioritas. Dinas Pelaksana Teknis (Kominfo) mengaku sangat kewalahan karena jumlah personil yang sedikit dan juga anggaran yang sangat minim karena setiap tahun juga mengalami pengurangan. Di sisi SKPD factor SDM juga rata-rata dikeluhkan karena jika berkaitan dengan IT sendiri tergolong kurang dan butuh orang-orang yang kompeten.

Salah satu yang cukup menghambat dari pelaksanaan Perda yaitu tidak adanya dukungan penuh terkait sikap pelaksana kebijakan dalam hal ini para pegawai SKPD. Diakui memang sebagian dari mereka masih ketergantungan menggunakan atau melakukan segala sesuatunya secara manual. Sehingga memang proses merubah kebiasaan ini butuh waktu yang lama. Berbeda ditataran pimpinan sendiri utamanya Bapak Bupati Kabupaten Banyums, Ir. H Achmad Husain yang memang sangat concern dan berkomitmen dalam pelaksanaan Perda ini dengan bentuk terus menghimbau dan mengeluarkan beberapa peraturan pendukung berupa Perbup ataupun SK.

Tidak adanya bagian khusus yang menangani masalah IT di Struktur Organisasi Tata Pemerintahan (SOTK) lingkup SKPD memang tidak menjadi masalah berarti karena sifat IT ini yang cenderung temporary sehingga bagian khusus ini hanya ada di SKPD yang menangani permasalahan pengolahan data dan informasi. Yang sangat disayangkan hingga saat ini belum ada SOP yang jelas dari Kominfo terkait dengan pelaksanaan Perda ini. Selama ini keberadaan blueprint menjadi acuan mereka untuk menjalankan program kegiatan dan manual book secara teknis yang bisa diakses oleh seluruh SKPD. Sehingga memang kesimpulannya daya dukung yang selama ini ada berdasarkan 4 komponen tersebut factor komunikasi dan sumber daya 70 % mendukung sedangkan disisi disposisi dan struktur birokrasi belum sama sekali menjadi daya dukung dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2012 ini.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan maka dapat disimpulkan bahwasannya memang penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 di Kabupaten Banyumas telah membuka pintu masuknya teknologi dalam lingkungan birokrasi Pemerintahan di sana . Selama 3 (tiga) tahun setelah dicanangkan Perda ini memang telah berjalan cukup baik namun masih tetap belum bisa berjalan secara optimal. Adapun alasan mendasar dikarenakan memang dalam realisasi rencana tindak Perda ini tidak sepenuhnya sesuai dengan yang ditargetkan berdasarkan tahapan - tahapan dalam *blue print* Perda. Hal tersebut dikarenakan dinas pelaksana teknis dalam hal ini Kominfo masih bertumpu pada pemrioritasan rencana kegiatan yang sudah diterapkan. Adanya pemrioritasan tersebut mengakibatkan tidak semua program kegiatan ditahapan dan tahun yang ditetapkan bisa dijalankan bahkan biasanya ditunda ataupun ditiadakan.

Secara keseluruhan memang program di tahun 2013 dan 2014 sudah hampir seluruhnya berjalan. Dijelaskan tahap persiapan banyak dilaksanakan di tahun 2013-2014, tahap pematangan di tahun 2015 dan tahap pematapan dan pelaksanaan di tahun 2016-2017 tetapi memang banyak juga program yang ditargetkan sepanjang tahun berjalan karena prinsipnya yang terus berkembang seperti penyiapan peralatan dan sumber daya pada tahapan persiapan. Tahapan-tahapan tersebut dirumuskan pada awal Perda No 4 Tahun 2012 ini dibentuk. Sedangkan untuk saat ini terhitung pelaksanaannya sudah memasuki tahun ke 3 dari 7 tahun target pelaksanaan. Sehingga dari tahapan itupun sudah ada beberapa yang terealisasi dan sudah berjalan. Hampir 80 % kegiatan yang ditargetkan di dua tahun pelaksanaan yaitu tahun 2013 dan 2014 sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana, adapun untuk perencanaan yang ditargetkan akan berjalan tiap tahunnya sudah barang tentu tidak bisa maksimal di satu atau dua tahun berjalan karena sifatnya yang terus berkembang dan mengalami pembaharuan.

2. Saran

1. Pemaksimalan pemenuhan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia. Penambahan jumlah pegawai khususnya di lingkup *pilot projet* (Kominfo) dan SKPD yang membutuhkan perlu dilakukan. Mengingat factor SDM mempengaruhi tingkat lambat

cepatnya kebijakan dilaksanakan karena berkaitan dengan beban tugas. Semakin besar beban tugas yang diemban maka semakin banyak pula personil yang harus menangani.

2. Dibentuknya sebuah tim khusus di setiap SKPD yang terdiri dari 2-3 orang bisa berasal dari pegawai tetap di lingkup kerja tersebut ataupun pengangkatan pegawai outsourcing sesuai kebutuhan SKPD yang khusus menangani permasalahan IT.
3. Dibentuknya aplikasi yang lebih sederhana, praktis, dan mudah dipahami. Karena selama ini sebagian SKPD mengeluhkan keberadaan aplikasi yang mereka pakai tidaklah praktis dan sering terjadi double data yang dupload atau dimasukan. Sehingga proses integrasi data perlu segera dilaksanakan, dengan menyelenggarakan forum untuk menyamakan persepsi antar SKPD mengenai pentingnya sharing atau proses integrasi data tersebut. Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah segera membentuk aturan pasti mengenai batasan-batasan apa saja yang mengkriteriakan data yang dimiliki di setiap SKPD bisa di *share* atau tidak.
4. Bidang Kominfo segera menerbitkan SOP (*standar operating procedures*) sebagai tolak ukur yang jelas pelaksanaan kebijakan dan merupakan pedoman untuk setiap SKPD untuk lebih memahami dalam menjalankan Perda No 4 Tahun 2012 ini secara sistematis dan terukur.
5. Dilaksanakan evaluasi secara berkala di tataran SKPD terhadap pelaksanaan Perda No 4 Tahun 2012 dengan melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati Banyumas untuk segera ditindak agar menimbulkan efek jera bagi SKPD yang secara sengaja tidak atau kurang berkomitmen dalam menjalankan Perda tersebut.
6. Diadakannya ajang penghargaan untuk pelaksanaan pengembangan *e-governmnet* yang paling baik di setiap SKPD Kabupaten Banyumas untuk memebrikan stimulus kepada mereka agar berkembang dan berkomitmen dalam melaksanakan kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung
- Andianto, Nico. 2009. *Good E-government, Transparansi dari Akuntabilitas Publik Melalui E-government*. Banyumedia Publishing : Jakarta.
- Budi Rianto, Lestari Tri. 2012. *Polri & Aplikasi E-government dalam Pelayanan Publik*. PMN: Surabaya
- Budiyanto, MT. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia Kerangka Teori dengan Pendekatan Teknis* . Graha Ilmu : Yogyakarta
- Burhan, Bungin. 2011, *Metododlogi Penelitian Kuantitatif*, Kenca, Jakarta
- Franklin A Grace and Ripley. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*. The Dorsey Pers : Chicago
- Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. UII Press: Yogyakarta
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media : Yogyakarta
- Pemerintahan Kabupaten Banyumas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Seksi Sarana Pos dan Telekomunikasi 2012. 2012. *Data Sarana Komunikasi, Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Banyumas 2012* : Banyumas
- Prasojo, Eko. 2007. *Reformasi dan Inovasi Birokrasi*. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara : Jakarta
- Putra, Fadillah. 2001. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Universitas Sunan Giri Surabaya: Surabaya

Sarwono Jonathan; 2006 ; *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* ; Graha Ilmu, Yogyakarta

Setiyono, Budi.2005. *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. Puskodak UNDIP: Semarang

Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Media Pressindo : Yogyakarta

Jurnal :

Nupikso, Daru. 2007. “ Penataan Kelembagaan Dalam Pengembangan E-Government Pemerintah Daerah Studi Kasus Implementasi Permen Kominfo Nomer 41 Tahun 2007 di Pemerintah Kota Yogyakarta”. Dalam Jurnal *Penelitian Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi*, Vol 12 No 2 Bulan Desember hal 105-124. Yogyakarta. Balai Pengkajian Dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Yogyakarta.

Undang-Undang :

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*

Keputusan Bupati Banyumas Nomor 406/910/2014 Tentang Tim Pengelolaan Website dan Subdomain Kabupaten Banyumas

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomer : 57/Kep/M.Kominfo/12/2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas

Peraturan Bupati Banyumas Nomer 84 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas

Peraturan Daerah Nomer 16 Tahun 2010 Kabupaten Banyumas Tentang Penjabaran Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas

Peraturan Daerah Nomor 25 Tentang Organisasai dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas

Peraturan Daerah Nomor 26 Tentang Organisasai dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas

Perda Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas)